

## KAJIAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PEDESAAN

**Pujiharto**

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Jl. Raya Dukuwaluh PO Box 202 Purwokerto 53182

### ABSTRAK

**P**engembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005-2025. Kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk di setiap desa, harus menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip otonomi daerah, pemberdayaan dan kemandirian lokal. Pembentukan Gapoktan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Rural Development*). Gapoktan hanyalah alat, dan merupakan sebuah pilihan bukan keharusan. Gapoktan perlu membangun jejaring sosial dengan pihak lain, memperbanyak peran diluar aktivitas produksi atau usahatani.

**Kata kunci** : *kelembagaan, gabungan kelompok tani, otonomi daerah, pemberdayaan, kemandirian lokal*

### PENDAHULUAN

Bidang pertanian di Indonesia saat ini memiliki kebijakan yang tergolong mendasar dan luas. Kebijakan tersebut antara lain pencaanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025 dan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada kedua kebijakan

tersebut, permasalahan kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro (Badan Litbang Pertanian, 2005).

Di tingkat makro, satu kelembagaan baru yang akan lahir adalah Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah non departemen, yang akan merumuskan secara terperinci tentang metode

penyuluhan, strategi penyuluhan, dan kebijakan penyuluhan. Di tingkat mikro, akan dibentuk beberapa lembaga baru, misalnya Pos Penyuluhan Desa dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Departemen Pertanian menargetkan akan membentuk satu Gapoktan di setiap desa khususnya yang berbasis pertanian. Gapoktan merupakan lembaga yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani.

Pemberdayaan petani dan usaha kecil di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan kelompok. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah kegagalan pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai

wadah untuk pemberdayaan masyarakat secara hakiki. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan budaya yang berjalan. Pendekatan yang *top-down planning* menyebabkan partisipasi masyarakat tidak tumbuh.

### **Beberapa Permasalahan dalam Pengembangan Kelembagaan Selama Ini**

Beberapa permasalahan dalam pengembangan kelembagaan, khususnya bagi kelembagaan yang sengaja diciptakan (*enacted institution*) Syahyuti, (2003):

1. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya adalah agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka dapat meningkat. Kelompok tani misalnya

- adalah kelompok orang-orang yang selevel, yaitu pada kegiatan usahatani satu komoditas tertentu. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.
2. Sebagian besar kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan *social capital* masyarakat secara nyata. Adalah hal yang lazim, setiap program membuat satu organisasi baru, dengan nama yang khas. Jarang sekali suatu program dari dinas tertentu menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada.
  3. Menerapkan pola generalisasi, sehingga struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam. Pembentukan kelembagaan kurang memperdulikan kompleks hal-hal abstrak yang ada di masyarakat bersangkutan, yaitu berupa harapan, keinginan, tujuan, prioritas, norma, kebutuhan, dan lain-lain yang sering kali tidak sesuai dengan program yang diintroduksikan (Zuraida dan Rizal, 1993). Contohnya keberhasilan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada petani pekebun lada di Lampung Utara tidak sukses penerapan program tersebut di Subang Jawa Barat (Agustian *dkk.*, 2003).
  4. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontak-kontak tani memang bisa dilakukan, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada *social learning approach*.
  5. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus

dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

6. Pengembangan kelembagaan diyakini akan terjadi jika dukungan material cukup. Sebagai contoh, pengembangan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) dipahami dengan memberikan bantuan traktor, *tresber*, pompa air, dan lain-lain; bukan bagaimana mengelolanya dengan manajemen yang baik.

#### **Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi Petani**

Meskipun dengan kondisi yang bervariasi, di tingkat desa telah ada berbagai kelembagaan ekonomi petani, yaitu kelompok tani dan koperasi. Dalam konteks peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani, Deptan akan melakukan penguatan kelompok tani dan pengembangan koperasi tani pada 436 kabupaten/kota di 32 propinsi, mengaktifkan forum pertemuan penyuluh pertanian, pertemuan kontak tani, serta pendataan dan penumbuhan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani (Deptan, 2006).

Kelompok tani merupakan kelembagaan tani yang langsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan usahatani. Di samping berfungsi sebagai wahana penyuluhan dan penggerak kegiatan anggotanya, beberapa kelompok tani juga mempunyai kegiatan lain, seperti gotong royong, usaha simpan pinjam dan arisan kerja untuk kegiatan usahatani. Keberagaman eksistensi dan kinerja kelompok tani ini mengindikasikan bahwa pembinaan kelompok tani masih diperlukan dalam rangka mendukung pengembangan sistem usaha agribisnis di pedesaan (Hermanto, 2007).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa. Fungsi dan peran Gapoktan adalah memfasilitasi pemecahan kendala/masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Hal ini berimplikasi bahwa pembentukan Gapoktan akan diikuti

dengan pembentukan divisi-divisi/unit-unit usaha berdasarkan adanya kendala atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya. Dengan demikian pembentukan divisi/unit usaha dalam Gapoktan bersifat kondisional dan tergantung pada kendala yang dihadapi petani dari setiap lokasi (Hermanto dan Subowo, 2006).

Gapoktan pada hakekatnya bukanlah lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang dapat dipilih di samping lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam aktivitas ekonomi secara langsung. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi

lainnya. Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan dengan pedagang saprotan maupun pedagang hasil-hasil pertanian (Syahyuti, 2007).

Menurut laporan Deptan (2006), sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani, 1.365 asosiasi tani, dan 10.527 koperasi tani. Sekarang ini 375 kabupaten/kota atau 86 persen dari total kabupaten/kota yang mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk Badan/Kantor/Balai/Sub Dinas/Seksi/UPTD/Kelompok Penyuluh Pertanian. Sisanya, yaitu 61 kabupaten/kota (14%) bentuk kelembagaannya tidak jelas. Sementara itu di Kecamatan, kelembagaan penyuluhan pertanian yang terdepan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada saat ini dari 5.187 Kecamatan, baru terbentuk 3.557 unit (69 %).

### **Strategi dalam Pengembangan GAPOKTAN**

Sampai dengan tahun 2006, setidaknya sudah terbentuk 3.000 unit

Gapoktan. Khusus untuk tahun 2007, Deptan menargetkan pembentukan 22 ribu unit Gapoktan. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). Disini terlihat bahwa, pembentukan Gapoktan bias kepada kepentingan “atas”, yaitu sebagai “kendaraan” untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan. Pembentukan Gapoktan, meskipun nanti dapat saja menjadi lembaga yang mewakili kebutuhan petani, namun awal terbentuknya bukan dari kebutuhan internal secara mendasar. Ini merupakan gejala yang berulang sebagaimana dulu sering terjadi, yaitu hanya mementingkan kuantitas belaka, namun tidak berakar di masyarakat setempat. Target akhir adalah aktifnya 66.000 Gapoktan hingga tahun 2009. Ini artinya, seluruh desa di Indonesia akan memiliki sebuah Gapoktan (Warsana, 2009).

Kegiatan di tahun 2006 adalah mengumpulkan data profil kelembagaan usaha petani di tingkat desa di masing-masing wilayah. Berdasarkan data tersebut, serta sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka pada tahun 2007 lembaga usaha petani di tingkat desa tersebut akan dibimbing, dilatih dan didampingi guna memperoleh akses terhadap informasi pasar, teknologi dan permodalan. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang fasilitasi dan pengukuran pembangunan pertanian oleh dinas dan instansi di daerah maupun oleh propinsi dan pemerintah harus dilakukan melalui Gapoktan yang ada di masing-masing desa yang beranggotakan seluruh petani, peternak, dan nelayan di desa tersebut.

Gapoktan tersebut akan senantiasa dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas. Lembaga pendamping yang utama adalah Dinas Pertanian setempat, di mana para penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan. Penguatan dari sisi

lain adalah melalui implementasi berbagai kegiatan pemerintah yang didistribusikan ke desa, dimana Gapoktan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang memungkinkan.

Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi yang diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di pedesaan melalui pertanian (Sekjen Deptan, 2006). Unit-unit usaha dalam Gapoktan dapat menjadi penggerak perekonomian di pedesaan. Untuk mendukung rencana tersebut, tiap propinsi mulai tahun 2007 diwajibkan untuk membuat *master plan* pengembangan agribisnis di kabupaten sesuai komoditas unggulan.

Gapoktan dibangun dalam upaya untuk memperkuat posisi daya tawar petani terhadap pihak luar. Gapoktan menjadi lembaga untuk kepentingan ekonomi, pemenuhan modal, kebutuhan pasar, dan informasi yang menjalankan fungsi representatif bagi

seluruh petani dalam kelompok taninya dan kelembagaan-kelembagaan lain.

### **Peran GAPOKTAN dalam Pengembangan Kelembagaan Pedesaan**

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan. Disebutkan bahwa Kelompok tani-nelayan adalah kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani -nelayan dan kesejahteraan anggotanya. Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horisontal, dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa. Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender.

Sedangkan Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani

yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya. Gapoktan merupakan Wadah Kerjasama Antar Kelompok tani-nelayan (WKAK), yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani-nelayan yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama (Warsana, 2009).

Untuk meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah komersial, kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk Gapoktan. Disini terlihat, bahwa pengembangan Gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari lembaga petani yang sudah berjalan baik, yaitu kelompok-kelompok tani. Dengan kata lain, adalah tidak tepat langsung membuat Gapoktan pada wilayah yang secara nyata kelompok-kelompok taninya tidak berjalan baik. Ketentuan ini sesuai dengan pola pengembangan kelembagaan secara umum, karena

Gapoktan diposisikan sebagai institusi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga fungsional di bawahnya, yaitu para kelompok tani (Syahyuti, 2007).

Pemberdayaan Gapoktan tersebut berada dalam konteks penguatan kelembagaan. Untuk dapat berkembang sistem usaha agribisnis memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Kelembagaan pertanian tersebut meliputi kelembagaan penyuluhan (BPP), kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, institusi perbenihan lainnya, kios, KUD, pasar desa, pedagang, asosiasi petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, P3A, UPJA, dan lain-lain.

Terdapat tiga peran pokok yang diharapkan dapat dijalankan oleh



Gapoktan Syahyuti ( 2007), Wahyuni (2009) :

1. Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun, misalnya terlibat dalam penyaluran benih bersubsidi yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan nama anggota. Demikian pula dalam pencairan anggaran subsidi benih dengan menerima voucher dari Dinas Pertanian setempat. Gapoktan merupakan lembaga strategis yang akan merangkum seluruh aktifitas kelembagaan petani di wilayah tersebut. Gapoktan dijadikan sebagai basis usaha petani di setiap pedesaan.
2. Gapoktan berperan untuk peningkatan ketahanan pangan di tingkat lokal. Mulai tahun 2006 melalui Badan Ketahanan Pangan telah dilaksanakan “Program Desa Mandiri Pangan” dalam rangka mengatasi kerawanan dan kemiskinan di pedesaan. Pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan dilakukan

melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok tani dibimbing agar mampu menemukan dan mengenali permasalahan yang dihadapi dan potensi yang mereka miliki, serta mampu secara mandiri membuat rencana kerja untuk meningkatkan pendapatannya melalui usahatani dan usaha agribisnis berbasis pedesaan. Beberapa kelompok tani dalam satu desa yang telah dibina kemudian difasilitasi untuk membentuk Gapoktan. Dengan cara ini, petani miskin dan rawan pangan akan meningkat kemampuannya dalam mengatasi masalah pangan dan kemiskinan di dalam suatu ikatan kelompok dan gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan nasib para anggotanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

3. Gapoktan dianggap sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

sehingga dapat menerima Dana Penguatan Modal (DPM), yaitu dana pinjaman yang dapat digunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya, sehingga harga tidak terlalu jatuh. Kegiatan DPM-LUEP telah dimulai semenjak tahun 2003, namun baru mulai tahun 2007 Gapoktan dapat sebagai penerima. Gapoktan dapat bertindak sebagai pedagang gabah, dimana ia akan membeli gabah dari petani lalu menjualkannya berikut berbagai fungsi pemasaran lainnya.

#### **Beberapa Prinsip yang Harus Diperhatikan dalam Pengembangan Kelembagaan GAPOKTAN Di Pedesaan**

Didasarkan atas perkembangan sosiopolitik yang terjadi, maka pengembangan kelembagaan Gapoktan perlu memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang semakin menguat, dan jangan hanya memposisikan sebagai alat proyek. Setidaknya perlu diperhatikan tiga aspek dalam pengembangan kelembagaan Gapoktan, yaitu:

##### 1. Konteks otonomi daerah

RPPK tidak boleh mengulangi kembali pada kekeliruan masa lalu, yang berpedoman pada perencanaan yang bersifat umum dan diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah. Mensosialisasikan rancangan atau skenario yang bersifat umum akan sulit dilaksanakan dan lebih banyak bersifat mekanistik dan lepas dari spesifikasi lokal, dan akan mematikan inisiatif masyarakat setempat sehingga menjadi kontraproduktif. Skenario yang bersifat umum itu, pada hakekatnya disusun dan dipikirkan oleh sekelompok orang saja secara terpusat, merupakan pendekatan yang banyak mengandung kelemahan (Uphoff, 1986).

Dalam bagian “Menimbang” pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa sesungguhnya makna dari prinsip keotonomian? Basri (2005) mengatakan bahwa pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas (*free will*) yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. *Free will* inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Jadi, pada hakekatnya, individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Dengan dasar ini, maka penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap individu.

Otonomi daerah merupakan hal yang penting dalam pengembangan Gapoktan karena mampu memberi kesempatan untuk memaksimalkan nilai dan memberi peluang kepada akses rakyat terhadap pemerintah. Karena beragamnya persoalan antarwilayah maka tak ada pendekatan yang "*one solution fit all*" dalam pengembangan kelembagaan Gapoktan. Secara konseptual, otonomi daerah merupakan wadah yang baik untuk berkembangnya *civil society* dan menjamin berjalannya mekanisme *checks and balances* antara pemerintah dengan warganya (Suradisastra, 2006).

## 2. Pengembangan kelembagaan Gapoktan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) yang berasal dari kata dasar "*empower*". Pemberdayaan dapat dilakukan terhadap individual, kelompok sosial, maupun terhadap komunitas. Payne (1997), menyebutkan bahwa pada intinya pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama dari pemberdayaan adalah tercapainya “kemandirian”.

Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa dan kelompok mereka untuk memperkuat diri dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Syahyuti (2007) menyebutkan ada dua prinsip dasar yang seyogyanya dianut di dalam proses pemberdayaan Gapoktan. *Pertama*, adalah menciptakan ruang atau peluang bagi kelompok tani dan anggotanya untuk mengembangkan dirinya secara mandiri. *Kedua*, mengupayakan agar kelompok tani dan anggotanya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

3. Kelembagaan Gapoktan sebagai cara untuk mencapai kemandirian lokal.

Menurut Taylor dan Mckenzie (1992), inisiatif lokal sangat diperlukan dalam pembangunan pedesaan, baik

dari sisi pemerintah maupun komunitas setempat. Dari sisi pemerintah, inisiatif lokal dibutuhkan apabila pemerintah belum mampu memberikan pelayanan yang memadai, sementara kemampuan perencanaan pusat juga dalam kondisi lemah. Dari sisi masyarakat lokal, di antaranya adalah karena masih banyaknya sumberdaya yang belum termanfaatkan, yang dipandang akan lebih efektif apabila menggunakan strategi lokal.

Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat daripada sebagai serangkaian upaya mekanistik yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

### **Sikap yang Harus Dibangun dalam Pengembangan GAPOKTAN**

Untuk pengembangan Gapoktan, maka sikap yang diterapkan semestinya

tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan masa sebelumnya. Berbagai sikap yang semestinya ditempuh adalah:

1. Kelembagaan adalah sebuah pilihan, bukan keharusan. Apapun kelembagaan yang akan diintroduksikan di pedesaan, terlebih dahulu merumuskan apa kegiatan yang akan dijalankan, baru kemudian dipilih apa wadah yang dibutuhkan. Berdasarkan konsep sistem agribisnis, aktivitas pertanian pedesaan meliputi upaya untuk menyediakan sarana produksi (benih, pupuk, dan obat-obatan), permodalan usahatani, pemenuhan tenaga kerja, kegiatan berusaha tani (*on farm*), pemenuhan informasi teknologi, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kelembagaan yang diintroduksikan saat ini sesungguhnya telah tumpang tindih. Untuk satu fungsi tersedia banyak kelembagaan, sedangkan satu kelembagaan juga dapat menjalankan berbagai fungsi (Syahyuti, 2007). Tumpang tindih tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
2. Hindari sikap yang memandang desa sebagai satu unit interaksi sosial ekonomi yang padu. Meskipun Gapoktan bekerja dalam satu unit desa, namun perlu dibangun jejaring sosial (*social network*) dengan Gapoktan lain. Relasi yang dibangun bukan bersifat hierarkhis administratif, namun lebih ke fungsional-ekonomi. Dalam hal peran Gapoktan sebagai lembaga pemasaran, maka relasi jangan membatasi diri hanya dengan lembaga formal. Relasi dengan para pelaku tata niaga, yang cenderung menerapkan suasana nonformal, perlu dibina dengan menerapkan prinsip saling menguntungkan dan keadilan (Warsana, 2009)
3. Gapoktan lebih banyak berperan di luar aktivitas produksi atau usahatani, karena kegiatan tersebut telah dijalankan oleh kelompok-kelompok tani serta petani secara individual. Untuk terlibat dalam mekanisme pasar, maka Gapoktan harus merancang diri sebagai sebuah kelembagaan ekonomi

dengan beberapa karakteristiknya adalah mengutamakan keuntungan, efisien, kalkulatif, dan menciptakan relasi-relasi yang personal dengan mitra usaha (Wahyuni, 2009).

4. Gapoktan salah satu komponen dalam pengembangan kelembagaan masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang pertanian. Pengembangan Gapoktan haruslah berada pada kerangka strategi yang lebih besar. Gapoktan hanyalah wadah dari kelompok tani untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Maka pembentukan dan pengembangan Gapoktan haruslah berada dalam konteks semangat otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan kemandirian lokal (Syahyuti, 2007).

### **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendekatan kelembagaan dalam pembangunan pertanian masih menjadi salah satu strategi penting dalam RPPK 2005-2025.

Kemampuan mengenali permasalahan kelembagaan, akan mampu menyusun strategi kelembagaan yang sesuai, sehingga faktor kelembagaan tidak menjadi salah satu kendala dalam implementasi program nantinya.

2. Secara umum pengembangan kelembagaan selama ini hanya memperkuat ikatan horisontal, mempermudah tugas kontrol bagi pelaksana program, penerapan pola generalisasi, pembinaan cenderung individual, dan lemah dalam pengembangan aspek kulturalnya.
3. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi karena lemahnya akses petani terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, dan sumber informasi.
4. Gapoktan diharapkan memiliki peran sebagai lembaga sentral dengan sistem yang terbangun, peningkatan ketahanan pangan tingkat lokal, dan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

5. Pengembangan kelembagaan Gapoktan setidaknya dijiwai oleh tiga prinsip yang saling terkait erat, yaitu pengembangan dalam konteks otonomi daerah, pemberdayaan, dan penguatan kemandirian lokal.
6. Pembentukan Gapoktan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Rural Development*). Gapoktan hanyalah alat, dan merupakan sebuah pilihan bukan keharusan. Gapoktan perlu membangun jejaring sosial dengan pihak lain, memperbanyak peran diluar aktivitas produksi atau usahatani.
7. Penggunaan kelembagaan Gapoktan yang semata-mata hanya untuk mensukseskan kegiatan lain, dan bukan untuk pengembangan kelembagaan itu sendiri, hanya akan berakhir dengan lembaga-lembaga Gapoktan yang semu, yang tidak akan pernah eksis secara nyata.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A., Supena F., Syahyuti, dan E. Ariningsih. 2003. Studi Baseline Program PHT Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian Lokal. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 – 2025. Dalam: <http://www.litbang.deptan.go.id/rppk>, 25 oktober 2005.
- Basri, Faisal H. 2005. “Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah”. Universitas Brawijaya, Malang. ([http://128.8.56.108/iris-data/PEG/Bahasa/malang/Malang\\_tantangan.pdf](http://128.8.56.108/iris-data/PEG/Bahasa/malang/Malang_tantangan.pdf), 22 Maret 2005).
- Deptan. 2006. Bahan Rapat Kerja Deptan dengan DPD-RI, tanggal 19 Juni 2006. Deptan, Jakarta.

- Hermanto. 2007. Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani Di Sumatera Selatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Boogor.
- Hermanto, dan Subowo, G. 2006. Model Sistem dan Usaha Agribisnis di Lahan Rawa Pasang Surut : Konsepsi Strategi dan Pengembangannya. Makalah Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa Secara Bijaksan dan Terpadu. Balai Litbang Tanaman Hutan Palembang, 28 Maret 2006 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang.
- Payne, Malcom. 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. MacMillan Press Ltd., London. Hal. 266.
- Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. 2006. Pidato sambutan dalam acara Apresiasi Wartawan di Balai Pendidikan dan Latihan Hortikultura, Lembang, Bandung, Jawa Barat.
- Suradisastra, Kedi. 2006. Pemanfaatan Kelembagaan untuk Pembangunan Sektor Pertanian Mendukung Otonomi Daerah. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor
- Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor
- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor
- Taylor, D.R.F. dan McKenzie. 1992. Development From Withins. London Routledge. Chapter 1 dan 10.
- Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.
- Wahyuni, Sri. 2009. Integrasi Kelembagaan di Tingkat Petani : Optimalisasi Kinerja Pembangunan Pertanian. Dimuat di Tabloid Sinar Tani 10 Juni 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Warsana. 2009. Pemantapan Kelembagaan Pada Gapoktan. Dimuat di Tabloid Sinar Tani 8 April 2009. BPTP Jawa Tengah.
- Zuraida, Desiree dan J. Rizal (ed). 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pemikiran Selo Soemardjan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.



Tabel 1. Matrik Fungsi-fungsi Agribisnis beserta Opsi Lembaga-lembaga yang dapat Menjalankan Fungsi Tersebut dalam Kegiatan Pertanian di Perdesaan

Fungsi	Lembaga yang dapat melakukan fungsi tersebut								
	Kel. tani	Ga-poktan	P3A	KUA	Kope-rasi	UPJA	Pos Penyuluhan Desa	Klinik Agribisnis	Kel. Pencapir
1. penyediaan saprotan	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
2. penyediaan modal	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
3. penyediaan air irigasi	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
4. kegiatan usahatani	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
5. pengolahan	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
6. pemasaran	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
7. penyediaan informasi teknologi	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
8. penyediaan informasi pasar	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Syahyuti (2007), Warsana (2009), Wahyuni (2009)

Keterangan : P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

KUA (Kelompok Usaha Agribisnis)

UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan)